

Kabar INKLUSI



NAWALA PROGRAM INKLUSI

EDISI 4 / Oktober - Desember 2024

NO-ONE IS LEFT BEHIND *Tidak Ada Satupun yang Tertinggal*

Pertemuan Komite Pengarah Program INKLUSI Sepakati Program Kerja 2025



Pemerintah Australia dan Indonesia telah menyepakati Program Kerja INKLUSI untuk tahun 2025. Fokus program ini mendukung masyarakat marginal di Indonesia dalam mengakses layanan dasar, meningkatkan pemberdayaan ekonomi, dan memperkuat partisipasi inklusif dalam pembangunan, yang bermanfaat bagi kelompok marginal. Langkah ini sejalan dengan fokus Pemerintah Indonesia, termasuk Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Program Kerja 2025 disepakati dalam pertemuan Komite Pengarah Program INKLUSI, forum tertinggi dalam tata kelola program. Komite ini dipimpin bersama oleh Sekretaris Menteri Kementerian PPN/Bappenas dan *Minister Counsellor for Governance and Human Development* dari Kedutaan Besar Australia, memastikan agar program berjalan selaras dengan agenda kedua negara.

Klik atau pindai untuk artikel lengkap | s.id/PertemuanPSC

INKLUSI Audiensi dengan Wakil Menteri PPPA: Penguatan Kolaborasi untuk Inklusi dan Perlindungan



Sekretariat INKLUSI bersama mitra Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Pusat Rehabilitasi Yakkum, (PR Yakkum), Kemitraan, dan Lakpesdam PBNU mengadakan audiensi dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, untuk membahas peluang kolaborasi strategis dalam mendukung inklusi dan perlindungan perempuan dan anak. Wakil Menteri mengakui peran penting Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program-program yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan. Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam mendorong kemitraan yang kuat antara lembaga pemerintah dan memperkuat kolaborasi antara Kementerian PPPA dan OMS Mitra INKLUSI untuk menciptakan layanan yang lebih inklusif dan responsif bagi perempuan dan anak di Indonesia.

Klik atau pindai untuk artikel lengkap | s.id/AudiensiWamenPPPA

Kunjungan Duta Besar Australia untuk Kesetaraan Gender ke Sekolah Perempuan di Bali



Duta Besar Australia untuk Kesetaraan Gender, Stephanie Copus-Campbell, mengunjungi Sekolah Perempuan di Bali, sebuah inisiatif pemberdayaan perempuan yang diinisiasi oleh KAPAL Perempuan dan difasilitasi oleh Bali Sruti melalui program INKLUSI. Kunjungan ini menyoroti komitmen bersama antara Australia dan Indonesia dalam memajukan kesetaraan gender serta memberdayakan perempuan di komunitas perkotaan dan pedesaan. Kunjungan Duta Besar Australia untuk Kesetaraan Gender ini merupakan bentuk komitmen yang kuat antara Australia dan Indonesia dalam mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan gender dan mewujudkan masyarakat yang inklusif.

Klik atau pindai untuk artikel lengkap | s.id/AGEvisit_SekolahPerempuan

Seminar Diseminasi Riset Inklusi Sosial dan Kewargaan “Membaca Inklusi Sosial dari Daerah”



Tim Kajian Inklusi Sosial dan Kewargaan (Sejalin) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), salah satu mitra penelitian Program INKLUSI, meluncurkan dua hasil riset dalam Seminar Diseminasi Riset bertajuk “Membaca Inklusi Sosial dari Daerah”, pada 22 Oktober 2024 di Auditorium FISIPOL UGM, Yogyakarta. Melalui diseminasi riset ini, harapannya dapat memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan inklusi sosial di tingkat daerah melalui rekomendasi kebijakan berbasis bukti, untuk lebih membuka peluang bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan di Indonesia.

Klik atau pindai untuk artikel lengkap | s.id/DiseminasiRiset_FISIPOLUGM

Pelatihan Pendampingan Kewirausahaan untuk Memperkuat Ekonomi Inklusif



Sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan mata pencaharian kelompok marginal, Sekretariat INKLUSI menyelenggarakan Pelatihan Pendampingan Kewirausahaan pada Oktober 2024 di Yogyakarta. Pelatihan ini memberikan keterampilan praktis untuk membantu kelompok marginal memulai dan mengelola usaha yang berkelanjutan serta mampu bersaing di pasar. Melalui pelatihan ini, harapannya Mitra INKLUSI dapat lebih baik dalam mendampingi kelompok usaha kecil di komunitas mereka, menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan taraf hidup, serta mendorong ekonomi yang lebih inklusif dan setara.

Klik atau pindai untuk artikel lengkap | s.id/KewirausahaanInklusif

16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Hari Disabilitas Internasional

Dialog Publik untuk Mengakhiri Perkawinan Anak di Tana Toraja



Sebagai bagian dari #16HAKTP, BaKTI dan ‘Aisyiyah, didukung oleh Program INKLUSI, melaksanakan Dialog Publik untuk Pencegahan Perkawinan Anak pada 19-20 November di Tana Toraja, sebuah kabupaten dengan angka prevalensi perkawinan anak tertinggi di Sulawesi Selatan. Inisiatif ini melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi perempuan, forum anak, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas mereka, menyelaraskan aksi multi-pemangku kepentingan, dan menggunakan Panduan Praktis Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) sebagai acuan utama.

Klik atau pindai untuk artikel lengkap | s.id/AksiKolektif_BaKTIaisyiyah

Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024: Menuju Cirebon Inklusif



Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024, mitra INKLUSI, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB Indonesia) bersama mitra lokalnya Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) mengadakan kegiatan bertema “Menuju Cirebon Inklusif” di Kecamatan Lemahabang, Cirebon. Acara ini juga memperingati Hari Hak Asasi Manusia, sekaligus memperkuat komitmen terhadap inklusivitas di Cirebon. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan mendorong kerja sama lintas sektor untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon. Acara ini menjadi contoh kolaborasi antara OMS, pemerintah, dan sektor swasta dalam mendukung inklusi disabilitas.

Klik atau pindai untuk artikel lengkap | s.id/HDICirebon_SIGAB

Kisah Keteguhan dan Harapan: Pekerja Migran Perempuan dalam Ketoprak RANGGAS



Dalam rangka memperingati 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Migrant CARE, berkolaborasi dengan seniman lokal di Solo, Jawa Tengah, menghadirkan seni pertunjukan Ketoprak, sebuah teater tradisional Jawa. Pertunjukan yang bertajuk “RANGGAS”—yang berarti perbukitan tandus—mengangkat kisah perjuangan dan tantangan hidup perempuan pekerja migran dari sebuah desa miskin. Melalui pertunjukan ini, harapannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan sekaligus mengajak kita semua untuk bersatu mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Dengan memadukan tradisi dan advokasi, inisiatif ini membuktikan bahwa budaya dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong perubahan.

Klik atau pindai untuk artikel lengkap | s.id/RANGGAS_MigrantCARE

CERITA

#16HAKTP: Kader PEKKA Menghapus Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan

16 HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2024

INKLUSI Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif

“Kesempatan pendidikan yang saya terima semakin memperkuat tekad saya untuk membela hak-hak perempuan. Bersama PEKKA, saya bertekad untuk menghapus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.”

Novemberlyn
Kader PEKKA—
memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendukung masyarakat marginal melalui Program INKLUSI.

Novemberlyn adalah seorang kader Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). PEKKA mendirikan Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK PEKKA), sebuah layanan keliling yang bertujuan membantu rumah tangga perempuan kepala keluarga, perempuan miskin, dan kelompok marginal lainnya di daerah terpencil untuk mengakses layanan-layanan dasar pemerintah yang sulit dijangkau. Bekerja sama dengan pemerintah dan penyedia layanan, KLIK PEKKA menghimpun aspirasi komunitas marginal terkait layanan esensial, perlindungan sosial, dan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga, serta menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.



Klik atau pindai untuk cerita lengkap | s.id/16HAKTP_PEKKA

#16HAKTP: Dari Petugas Pelaksana Perkawinan Anak Menjadi Advokat Pencegahan

16 HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2024

INKLUSI Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif

“Dulu, saya sering menikahkan anak-anak, bahkan untuk gadis yang sangat muda, termasuk anak saya sendiri pada usia 18 tahun. Melalui diskusi dalam program INKLUSI, saya mulai memahami risiko serius dari pernikahan anak—masalah kesehatan, tingkat perceraian yang lebih tinggi, dan kerentanannya sebagai orang tua muda. Sekarang, saya berkomitmen untuk melindungi anak-anak di komunitas saya dan aktif mengadvokasi pencegahan praktik berbahaya ini.”

Joharis
Kepala Dusun di Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara

Joharis adalah Kepala Dusun di Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sebagai Kepala Dusun, Joharis sebelumnya sering menikahkan anak-anak, termasuk yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun, setelah adanya kolaborasi antara 'Aisyiyah dan pemerintah setempat melalui Program INKLUSI, Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan Perkawinan Anak diterapkan. Inisiatif ini memberi Joharis pemahaman lebih dalam tentang risiko yang terkait dengan perkawinan anak. Sekarang, ia menjadi advokat yang kuat untuk pencegahan pernikahan anak di komunitasnya.



Klik atau pindai untuk cerita lengkap | s.id/16HAKTP_Aisyiyah



Risalah Kebijakan : "Mewujudkan Kebijakan Inklusif untuk Semua"

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian yang disusun oleh mitra penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), yang merekomendasikan penguatan proses pembuatan kebijakan melalui pelibatan yang bermakna, peningkatan implementasi kebijakan melalui kebijakan turunan dan perbaikan data terpilah, serta pengarusutamaan nilai Kesetaraan Gender, Disabilitas, Inklusi Sosial (GEDSI) untuk mendorong perspektif inklusi di kalangan pemangku kepentingan.



Baca risalah kebijakan di:
s.id/PolicyBrief_FISIPOLUGM_ID

Podcast Suara PEKKA: PEKKA Tempat Belajar Semua Orang

Podcast ini mengangkat kisah Ai Yani, seorang penyintas kekerasan dalam rumah tangga, yang menemukan kekuatan dan pemberdayaan melalui komunitas PEKKA. Bergabung dengan PEKKA membuka jalan baginya untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi. Kini, sebagai Sekretaris Eksekutif Federasi Serikat PEKKA, Ai Yani berperan penting dalam memberdayakan perempuan kepala keluarga dan mendukung perempuan lain yang menghadapi tantangan serupa.



Podcast dapat diakses di:
<https://s.id/PodcastSuaraPEKKA1>

PRODUK PENGETAHUAN

GEDSI Handbook: Buku Pegangan Penerapan Strategi Pengarusutamaan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan

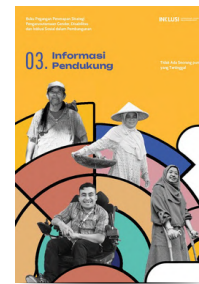
Sekretariat INKLUSI telah meluncurkan *GEDSI Handbook* yang disusun untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan buku pegangan yang dapat dipakai untuk memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan Gender, Disabilitas dan Inklusi sosial (GEDSI), khususnya bagi Mitra dan sekretariat INKLUSI, serta pemangku kepentingan lain yang terlibat dengan program INKLUSI sesuai dengan kebutuhan masing-masing.



Buku 1:
Memahami Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan



Buku 2:
Penerapan Pengarusutamaan GEDSI



Buku 3:
Informasi Pendukung



Buku dapat diakses di:
s.id/GEDSIHandbook1



Buku dapat diakses di:
s.id/GEDSIHandbook2



Buku dapat diakses di:
s.id/GEDSIHandbook3

NO-ONE IS LEFT BEHIND

Tidak Ada Satupun yang Tertinggal

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif, atau **INKLUSI**, berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 5 tahun (dengan anggaran mencapai A\$75 juta sepanjang 2021-2026) dengan kemungkinan perpanjangan 3 tahun hingga A\$45 juta (2026-2029). Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, >120 kabupaten, dan >800 desa di Indonesia.

